

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN DI SMP NEGERI 2 SAJIRA KABUPATEN LEBAK

Lela Foni Sulistiyowati
Widyaiswara LPMP Banten

ABSTRAK

Globalisasi dan penurunan moral menjadi tantangan eksternal sedangkan pencapaian standar nasional menjadi tantangan internal mengapa sekolah perlu melakukan penjaminan mutu pendidikan, dalam rangka menghasilkan output pendidikan yang kompeten dan memiliki daya saing. Tujuan kegiatan ini adalah sekolah dapat: 1) melakukan pemetaan mutu melalui kegiatan evaluasi diri sekolah, 2) membuat perencanaan peningkatan mutu, 3) melaksanakan program peningkatan mutu sekolah, 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi, 5) menetapkan standar baru dan strategi baru. Dengan menggunakan pendampingan sebanyak 4 kali dengan kegiatan prapendampingan 1 kali pertemuan. Dalam 4 kali pendampingan tahapan Siklus SPMI dilaksanakan. Siklus SPMI terdiri dari Pemetaan mutu sekolah-Rencana peningkatan mutu-pelaksanaan peningkatan mutu-monitoring dan evaluasi-penetapan standar/strategi baru. Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu November-Desember 2016 bertempat di SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dengan implementasi SPMI melalui pendampingan, sekolah dapat memetakan mutu sekolahnya sendiri. Peta mutu SMP Negeri Sajira menunjukkan hasil yang rendah untuk standar peningkatan kompetensi PTK yakni 2.39 dan standar hasil belajar 2,92. Selain itu sekolah dapat merancang kegiatan peningkatan mutu, melaksanakan kegiatan peningkatan mutu melalui revitalisasi MGMP sekolah, IHT IT untuk Pembelajaran dan menyusun SOP KBM. Sekolah juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi. Hasil monev menunjukkan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu baru mencapai 25% dari sasaran 50% yang ditetapkan. Oleh karena itu sekolah menetapkan strategi baru yakni menambah tim audit untuk memperkuat tim PMP sekolah.

Kata kunci : *Implementasi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Program pendampingan*

PENDAHULUAN

Memasuki abad 21, mutu pendidikan terus menjadi isu hangat dalam dasawarsa terakhir. Globalisasi merupakan faktor eksternal yang mendorong dunia pendidikan harus menghasilkan lulusan yang kompeten agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari Negara lain. *Out put* dari sebuah pendidikan tak hanya dituntut dalam hal kompetensi pengetahuan saja, namun juga sikap dan keterampilan yang harus senantiasa selaras dengan perkembangan jaman dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat. Pendidikan merupakan sistem yang secara umum terdiri dari tiga komponen yaitu *input*, proses, dan *output*. Ketiga komponen tersebut memiliki ciri yaitu adanya perencanaan, saling ketergantungan (*interdependent*), dan memiliki tujuan. Peserta didik sebagai *input* utama dalam pendidikan harus dapat dikembangkan potensinya dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat terjadinya pembelajaran. Agar memperoleh kepastian bahwa setiap anak bangsa dapat memperoleh pendidikan yang bermutu maka diperlukan penjaminan mutu pendidikan. Hakekatnya, penjaminan mutu pendidikan adalah serentetan proses dalam sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang program atau kegiatan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah beserta pendidikan non formal wajib melakukan penjaminan mutu jenjang pendidikan secara berkelanjutan. Demikian pula dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, sekolah harus membuat rencana kerja yang mendukung peningkatan mutu lulusan serta melakukan pengawasan dan evaluasi melalui pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Peningkatan mutu di Satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu dari seluruh komponen sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu di seluruh sekolah di Indonesia dengan pelibatan seluruh komponen sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah agar penjamin mutu pendidikan berjalan dengan baik. Sistem ini terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen satuan pendidikan dalam satuan pendidikan. Sedangkan SPME adalah sistem penjaminan mutu yang

dilaksanakan oleh pihak luar sekolah baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Peran LPMP sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan adalah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Selain itu, LPMP juga berperan membantu pemerintah daerah (dalam hal ini satuan pendidikan) dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal dalam berbagai upaya melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan dapat mencapai SNP (Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Pasal 1 ayat [24]). Lebih tegas tentang urgensi dan strategi penjaminan mutu pendidikan dimuat dalam Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang memperkuat peran LPMP untuk melakukan inovasi dalam rangka mewujudkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, LPMP terus berupaya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan dalam wilayah provinsi Banten diantaranya adalah program pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di 40 sekolah model dan di 200 sekolah imbas. Keberhasilan program pendampingan SPMI memang tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat, oleh karenanya program tersebut dilakukan secara berkelanjutan. *Best practice* ini melaporkan kegiatan implementasi SPMI pada salah satu sekolah imbas yakni SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak yang merupakan imbas dari sekolah model SPMI SMP N 3 Ragkasbitung Kabupaten Lebak.

Ruang lingkup kegiatan program pendampingan SPMI terdiri dari dua jenis pengembangan yakni : pengembangan manajemen dan pengembangan pembelajaran dengan tahapan implementasi SPMI (siklus SPMI) sebagai berikut :

1. Pemetaan mutu sekolah melalui kegiatan evaluasi diri sekolah
2. Perencanaan peningkatan mutu sekolah
3. Pelaksanaan program penjaminan mutu sekolah
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
5. Penetapan Standar baru

Tujuan

1. Sekolah dapat melakukan pemetaan mutu melalui kegiatan evaluasi diri sekolah
2. Sekolah dapat membuat perencanaan peningkatan mutu
3. Sekolah dapat melaksanakan program penjaminan mutu sekolah
4. Sekolah dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi
5. Sekolah dapat menetapkan standar baru dan strategi baru

Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh warga SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak yakni kepala sekolah, tim Penjaminan Mutu Sekolah dan guru-guru di SMP N 2 Sajira Kabupaten Lebak.

Materi kegiatan

Materi kegiatan pada Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui program pendampingan di SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak antara lain sebagai berikut :

1. Materi kegiatan sosialisasi

Materi kegiatan sosialisasi terdiri dari materi mekanisme /tahapan dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) satuan pendidikan dan pembuatan instrument monitoring dan audit. Sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI) memiliki siklus seperti gambar berikut ini :

- a. Tahap 1 Pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan ini perlu melibatkan seluruh anggota sekolah dan para pemangku kepentingan (dinas pendidikan, pengawas sekolah, komite sekolah dan tokoh masyarakat) untuk mendapatkan informasi dan evaluasi dari berbagai sisi.
- b. Tahap 2 Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu.
Rencana peningkatan mutu sekolah yang disusun dalam kegiatan pendampingan ini meliputi manajemen, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sumberdaya manusia dan dukungan infrastruktur. Penyusunan rencana peningkatan mutu berpedoman pada peta mutu sebagai masukan utama dengan mempertimbangkan dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum, standar nasional pendidikan, serta dokumen strategis pengembangan sekolah
- c. Tahap 3 Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu.
Pada tahap pelaksanaan sekolah akan melaksanakan perencanaan yang telah disusun baik dalam bidang pengembangan manajemen maupun pengembangan pembelajaran. Sebagai contoh, guru akan menerapkan proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang berkaitan dengan program penjaminan mutu sekolah.
- d. Tahap 4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu.
Merupakan kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan pencapaian mutu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang dimonitoring dan dievaluasi secara umum dilihat dari aspek manajemen, proses belajar dan hasil belajar, kegiatan ekstrakurikuler serta dampak penjaminan mutu sekolah baik dalam hal peningkatan mutu kompetensi siswa baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan.

- e. Tahap 5 Penetapan Standar Mutu Baru dan Penyusunan strategi peningkatan mutu.

Penyusunan standar mutu baru dan strategi peningkatan perlu dilakukan jika sekolah belum mampu mencapai SNP berdasarkan strategi sebelumnya. Sekolah yang telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan dapat menetapkan standar baru diatas standar nasional pendidikan.

2. Materi kegiatan pendampingan

Materi kegiatan pendampingan I, II, III dan IV terdiri dari menganalisis PMP sekolah imbas sebagai hasil evaluasi diri sekolah, menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil analisis PMP menggunakan *fish bond* hingga menjadi program kegiatan, menyusun instrumen audit mutu, melaksanakan audit, refleksi bidang pembelajaran serta monitoring dan evaluasi oleh bidang manajemen Tim Penjaminan Mutu Sekolah.

Metode/ Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan pada kegiatan implementasi SPMI adalah melaksanakan tahapan siklus SPMI yang terdiri dari 5 tahap (1) Pemetaan mutu sekolah - (2) Perencanaan Peningkatan Mutu – (3) Pelaksanaan Program Penjaminan Mutu – (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi - (4) Penetapan Standar baru. Kegiatan implementasi ini dilaksanakan melalui pendampingan untuk pengembangan bidang manajemen dan pengembangan bidang pembelajaran. Kerangka acuan kegiatan pendampingan implementasi SPMI adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kerangka Acuan Kegiatan Pendampingan

TAHAP I : PENGEMBANGAN BIDANG MANAJEMEN	
SESI I	
a. Sosialisasi SPMI dari Kepala Sekolah dan Pengawas kepada pemangku kepentingan sekolah	Peserta : 1. Kepala Sekolah 2. Guru 3. Pengawas Sekolah 4. Perwakilan Sekolah Imbas 5. Komite Sekolah 6. Tokoh masyarakat
b. Pelaksanaan evaluasi diri sekolah untuk memetakan kondisi mutu sekolah	
c. Penyusunan perencanaan program sekolah yang memasukan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam program yang dirancang	
d. Penyusunan dan perbaikan dokumen sekolah meliputi RKS, RKAS, RPS, Dokumen I	
e. Pembentukan Unit Penjaminan Mutu Sekolah termasuk tim Penjaminan Mutu Sekolah	
f. Penyusunan instrument monitoring dan evaluasi	

SESI II	
a. Evaluasi dokumen sekolah (tindak lanjut sesi I) dan penyempurnaan dokumen 1 b. Penyempurnaan sistem monitoring dan instrumennya	Peserta : 1. Pengawas Sekolah 2. Kepala Sekolah 3. Guru
TAHAP 2 : PENGEMBANGAN BIDANG PEMBELAJARAN	
A. Pengembangan Pembelajaran 1. Pengembangan Rencana Pembelajaran dan ekstrakurikuler berdasarkan analisis SWOT, Isu lokal, nasional dan global meliputi bidang sosial, ekonomi dan lingkungan 2. Pengembangan strategi pembelajaran, praktik proses 3. Mekanisme monitoring proses pembelajaran B. Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah dapat mengundang fasilitator secara mandiri untuk mendapatkan pendampingan secara berkala dan intensif	Peserta : 1. Pengawas sekolah 2. Kepala Sekolah 3. Guru

Pendampingan sebanyak empat kali dengan durasi waktu 4 jam pelajaran (4 JP) untuk masing-masing pendampingan.

Alat/Instrumen yang Digunakan

Instrumen yang digunakan pada kegiatan ini adalah ;

1. Instrumen PMP sekolah dari DAPODIK
2. Lembar Kerja 1. Diagram Fish Bond
3. Lembar Kerja 2. Analisis Sumber Masalah
4. Lembar Kerja 3. Sasaran Sekolah yang diinginkan
5. Lembar Kerja 4. Rancangan Kegiatan Sekolah
6. Form Rencana Tindak Lanjut

Waktu Kegiatan

Kegiatan implementasi sistem Penjaminan Mutu Internal melalui pendampingan di SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak dilaksanakan mulai Minggu ke1 November hingga Minggu ke 1 Desember 2016

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilakukan di SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak.

HASIL KEGIATAN

Hasil dan Kebermanfaatan

a. Kegiatan Pra Pendampingan

Sebelum kegiatan pendampingan sekolah imbas dilaksanakan, sekolah imbas mengikuti kegiatan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh sekolah model melalui kegiatan bimtek

sekolah model dengan anggaran yang ada di DIPA LPMP Banten tahun 2016. Pada kegiatan ini sekolah model dan fasilitator daerah yakni pengawas Pembina mensosialisasikan materi yang berkenaan dengan penjaminan mutu diantaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pemetaan Mutu, Perencanaan Pemenuhan Mutu, Implementasi Pemenuhan Mutu, Monitoring dan Evaluasi. Peserta pada kegiatan ini adalah seluruh guru sekolah model, komite sekolah model, tokoh masyarakat, 5 kepala sekolah imbas dan 10 orang guru dari 5 sekolah imbas. Selanjutnya sekolah model dan fasilitator membimbing sekolah imbas melakukan pengisian instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan evaluasi diri sekolah. Kemudian fasilitator daerah mengarahkan sekolah imbas untuk membentuk tim penjaminan mutu sekolah.

b. Pendampingan 1

Pada pendampingan 1, penulis sebagai petugas pendamping sekolah imbas SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak mendampingi sekolah (tim PMP sekolah) melakukan analisis terhadap instrument PMP yang meliputi standar isi pendidikan, proses pembelajaran, hasil belajar, penilaian, standar peningkatan kompetensi PTK, standar pengelolaan pendidikan. Analisis dilakukan menggunakan instrument analisis aplikasi *Microsoft excel* sederhana yang telah disusun oleh tim IT LPMP Banten. Dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), langkah ini merupakan tahapan penyusunan peta mutu di satuan pendidikan.

Tabel 3. Skor Pencapaian Standar pendidikan dengan skala 4

Standar	Awal
Hasil Belajar	2.92
Isi Pendidikan	3.65
Proses Pembelajaran	3.46
Penilaian	3.83
Peningkatan Kompetensi PTK	2.39
Pengelolaan Pendidikan	3.67

Berdasarkan grafik dan data skoring di atas dapat diketahui bahwa peta mutu SMPN Sajira 2 yang terendah adalah standar peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yakni 2.39 dan hasil belajar 2.92, keduanya menunjukkan hasil dibawah 3. Skor tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian standar peningkatan kompetensi PTK dan standar hasil belajar berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah masih dibawah Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan pencapaian standar yang sudah diatas 3 (menuju SNP) berdasarkan peta mutu sekolah adalah proses pembelajaran 3,46, isi pendidikan 3,65, pengelolaan pendidikan 3.67, dan penilaian 3.83. Berdasarkan data tersebut

maka standar yang diprioritaskan untuk ditingkatkan adalah standar yang pencapaiannya masih rendah (di bawah SNP) yakni standar kompetensi PTK dan hasil belajar. Namun, dalam menentukan prioritas peningkatan mutu, sekolah dapat mempertimbangkan berbagai hal seperti visi dan misi sekolah, kesanggupan sekolah dalam hal pembiayaan dan sumber daya manusia serta kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya sekolah melakukan analisis sumber masalah pada standar peningkatan kompetensi PTK dan standar hasil belajar dengan menggunakan *fish bond* (meliputi SDM, metode, material dan peralatan), menganalisis urgensi unsur masalah dalam *fish bond*, menentukan sasaran peningkatan mutu sekolah berdasarkan hasil *fish bond* yang tetap menyelaraskan dengan visi dan misi SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak, dan merencanakan kegiatan sekolah untuk peningkatan mutu hingga pada akhirnya menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan sebagai tahapan implementasi SPMI di sekolah.

Standar Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berikut ini adalah hasil analisis *fish bond* SMP Negeri 2 Sajira tentang masalah yang berhubungan dengan Standar Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Berdasarkan diagram *fish bond* diatas dijelaskan bahwa rendahnya standar peningkatan mutu PTK di SMP Negeri 2 Sajira ditilik dari Sumber Daya Manusia (SDM) dianalisis bahwa nilai UKG masih rendah, Mismatch antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu, kompetensi pedagogik masih rendah dan administrasi pembelajaran belum tertib. Dari unsur peralatan yang dimiliki oleh sekolah berkaitan dengan rendahnya pencapaian standar peningkatan PTK disebabkan karena sarana IT yang dimiliki sekolah masih terbatas, belum optimalnya anggaran MGMP dan penyediaan buku sumber PBM masih sangat kurang. Sementara itu, jika menilik dari unsur metode penyebab rendahnya pencapaian standar peningkatan kompetensi PTK karena belum ada ketentuan/peraturan disekolah bahwa guru harus menguasai IT, belum maksimalnya fungsi MGMP sekolah, belum memiliki standar operasional prosedur dalam PBM, dan belum maksimalnya SOP. Jika dilihat dari unsur material maka rendahnya pencapaian terjadi karena penguasaan IT belum tercantum dalam KTSP, belum ada reward and punishment pada MGMP, belum tersosialisasikan SOP PBM, dan belum ada reward and punishment pada administrasi pembelajaran. Selanjutnya sekolah menganalisis

urgensi dari setiap unsur masalah apakah masuk dalam kategori urgen, sedang atau tidak urgen. Penentuan urgensi ini penting dilakukan agar sekolah dapat lebih fokus dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan mutu. Hasil analisis urgensi untuk masalah peningkatan kompetensi PTK secara lengkap disajikan pada lampiran 1.

Selanjutnya sekolah menentukan sasaran sekolah yang diinginkan dengan berpedoman pada visi, misi dan tujuan sekolah (lampiran 2). Setelah mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah, serta urgensi dari setiap unsur masalah maka sasaran peningkatan mutu SMP Negeri 2 Sajira adalah 50% kompetensi PTK mengalami peningkatan dengan kegiatan sekolah yang dirancang adalah revitalisasi MGMP Sekolah dan pelatihan IT untuk pembelajaran. Rincian kegiatan tersebut terdapat dalam tabel 4 dan 5 berikut ini

Standar Hasil Belajar

Selain pencapaian standar peningkatan kompetensi PTK yang masih rendah (2,39), pencapaian standar hasil belajar di SMP Negeri 2 Sajira juga masih rendah yakni 2,92. Oleh karena itu penulis sebagai petugas pendamping sekolah imbas mendampingi sekolah melakukan analisis *fish bond* dengan hasil sebagai berikut :Diagram *fish bond* standar hasil belajar di atas menunjukkan bahwa yang menjadi sumber masalah dari unsur sumber daya manusia adalah nilai Ujian Nasional yang masih rendah, intake siswa masih rendah, minat baca dan belajar siswa masih rendah serta administrasi penilaian belum tertib. Jika dianalisis dari unsur material sekolah berpendapat bahwa standar hasil belajar rendah karena format remedial dan pengayaan belum dibakukan, sekolah belum menetapkan peraturan seleksi penerimaan siswa baru, belum tersedianya buku-buku penunjang/ referensi factual, pedoman penilaian belum tersosialisasi dan dibakukan. Hasil analisis unsur metode didapatkan bahwa belum ada standar operasional prosedur dalam PBM, belum maksimalnya SOP administrasi pembelajaran dan supervisi. Analisis dari unsur peralatan menunjukkan bahwa bukti fisik pelaksanaan remedial dan pengayaan masih minim, sekolah harus menyediakan bank soal untuk seleksi penerimaan siswa baru. Sekolah belum menyediakan buku-buku referensi yang actual untuk menunjang pembelajaran, dan sekolah perlu menjadwalkan waktu sosialisasi pedoman penilaian yang baku. Sebagaimana yang dilakukan pada standar peningkatan kompetensi PTK, pada standar hasil belajar ini sekolah juga menganalisis urgensi dari setiap unsur masalah apakah masuk dalam kategori

urgen, sedang atau tidak urgen. Hasil analisis urgensi untuk masalah peningkatan kompetensi PTK secara lengkap disajikan pada lampiran 3. Dengan tetap mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah, maka sasaran sekolah untuk peningkatan mutu adalah 50% hasil belajar siswa meningkat dengan rencana kegiatan seperti terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Rencana Kegiatan Sekolah Penyusunan SOP KBM

Kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran	Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan	Kegiatan yang berkaitan dengan budaya dan lingkungan
1. Mendiskusikan hal – hal yang menjadi aturan dalam SOP (misal : Prosedur Penyusunan RPP, Waktu pengumpulan, Prosedur Pengesahan oleh kepala sekolah)	1. Menyusun SOP 2. Mengesahkan SOP 3. Mensosialisasikan SOP	

Tim Penjaminan Mutu Sekolah didampingi penulis sebagai petugas pendamping sekolah imbas, selanjutnya menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan diimplementasikan sebagai upaya peningkatan mutu sekolah berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat. Penyusunan RTL ini dalam siklus SPMI merupakan tahap 2 yakni penyusunan rencana peningkatan mutu. Sesuai dengan RTL yang telah disusun oleh tim PMP sekolah, ada 3 kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan rencana peningkatan mutu yakni 1). Revitalisasi MGMP sekolah, 2).IHT IT untuk pembelajaran dan 3).Penyusunan SOP KBM.RTL

c. Pendampingan 2

Kegiatan pendampingan ke 2 ini dalam siklus SPMI merupakan tahap ke 3 yakni pelaksanaan rencana peningkatan mutu. Kegiatan berlangsung pada minggu ke 3 November 2016 dengan agenda kegiatan revitalisasi MGMP Sekolah dan Penyusunan SOP KBM yang didampingi oleh penulis sebagai petugas pendamping bidang pengembangan pembelajaran. Selain itu pada minggu ke 3 ini tim Audit sekolah mulai melakukan penyusunan instrumen audit mutu.

Pelaksanaan revitalisasi MGMP sekolah dimulai dengan kegiatan mengumpulkan semua guru.Kepala sekolah memberikan motivasi tentang pentingnya mengaktifkan MGMP sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi guru sesuai mata pelajaran

masing-masing. Penulis sebagai petugas pendamping menyampaikan materi revitalisasi MGMP dan memandu kegiatan. Peserta selanjutnya dikelompokkan sesuai mata pelajaran masing-masing. Tiap kelompok berdiskusi untuk menyusun penganggaran MGMP Sekolah oleh masing – masing mata pelajaran, menyusun jadwal pertemuan MGMP Sekolah, membuat undangan MGMP sekolah, menyiapkan administrasi MGMP (Daftar hadir, Notulensi). Pelaksanaan penyusunan SOP KBM dan penyusunan instrument audit mutu dilaksanakan pada sesi siang yang dihadiri oleh kepala sekolah dan tim PMP sekolah. Penulis sebagai petugas pendamping membagi tim PMP menjadi 2 kelompok. Penyusunan SOP KBM dilakukan oleh pengembang sekolah dan ketua tim PMP, sedangkan instrument audit disusun oleh kepala sekolah dan petugas audit internal yang telah di SK kan oleh kepala sekolah. Hasil penyusunan SOP KBM secara lengkap disajikan dalam lampiran 6 dan contoh instrument audit disajikan dalam lampiran 7.

d. Pendampingan 3

Agenda pada pendampingan 3, sekolah masih melanjutkan kegiatan peningkatan mutu yang telah disusun dalam RTL yakni melaksanakan IHT IT untuk pembelajaran yang dilaksanakan selama 3 hari. Penulis hanya mendampingi pada hari pertama kegiatan. Kegiatan ini memanfaatkan tutor sebaya sebagai narasumber kegiatan. Guru yang menguasai IT menyampaikan materi tentang (1). Pengenalan hardware computer (2) Pengenalkan MS Office (Ms-Word, Ms-Excel, Ms-PPT) dan (3) Pengenalan penggunaan jaringan internet (Browsing, pembuatan e-mail, dan MedSos). Guru lain yang sudah mahir membantu narasumber saat peserta praktik.

Pada pendampingan 3 auditor sudah mulai melaksanakan tugasnya melakukan audit, yang dalam siklus SPMI merupakan tahap ke 4 yakni pelaksanaan audit mutu. Kegiatan yang diaudit adalah berlangsungnya IHT IT pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang disusun pada pendampingan sebelumnya. Audit meliputi pemeriksaan terhadap undangan kegiatan, daftar hadir peserta, notulensi, kesesuaian materi yang disampaikan narasumber. Contoh hasil audit disajikan dalam lampiran 7.

e. Pendampingan 4

Kegiatan yang dilaksanakan pada pendampingan 4 adalah refleksi pelaksanaan implementasi SPMI di SMP Negeri 2 Sajira. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim PMP dan kepala sekolah

menyampaikan ketercapaian sasaran (dalam RTL ditetapkan sasaran 50% terjadi peningkatan kompetensi PTK dan 50% terjadi peningkatan hasil belajar). Untuk kegiatan revitalisasi MGMP sekolah hingga pendampingan 4, baru dilaksanakan 1 kali pertemuan. Sedangkan kegiatan IHT IT untuk pembelajaran telah tuntas dilaksanakan, namun baru 25% guru yang meningkat kemampuannya dibidang IT. Sehingga tim PMP menyatakan hingga pendampingan 4 baru 25% terjadi peningkatan kompetensi PTK. Untuk standar hasil belajar, tim PMP menyatakan hingga pendampingan ke 4 sekolah sudah menyusun SOP dan sudah disosialisasikan kepada seluruh guru, namun belum semua guru melaksanakan dan belum semua guru diaudit mengingat begitu banyak kegiatan yang berlangsung dalam waktu bersamaan. Tim PMP menyatakan sasaran hasil belajar baru 10 % tercapai. Tim PMP akan menyiapkan strategi baru yakni menambah tim audit agar lebih memudahkan dalam memantau keterlaksanaan peningkatan standar.

Berdasarkan refleksi tersebut, penulis memberi masukan agar proses implementasi SPMI tetap dilaksanakan sesuai yang sudah direncanakan meskipun tanpa adanya pendampingan dari LPMP. Karena sejatinya SPMI harus dilaksanakan oleh sekolah sendiri dan LPMP hanya membantu mendampingi sekolah mengenal SPMI. Kontinuitas melaksanakan apa yang sudah direncanakan untuk peningkatan mutu, meskipun sedikit demi sedikit, akan menjadi budaya mutu.

Tantangan

Yang menjadi tantangan dalam kegiatan ini adalah waktu pelaksanaan pendampingan yang terlalu singkat yakni 4 kali pendampingan dengan 1 kali pra pendampingan yang diselesaikan dalam waktu 5 minggu. Hal ini kurang memberi kesempatan bagi pihak sekolah dalam mengimplementasikan SPMI. Selain itu, SMP Negeri Sajira terpilih menjadi pusat belajar bagi kegiatan guru pembelajar untuk beberapa mata pelajaran, sehingga menyita waktu dan perhatian beberapa guru yang ikut bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan implementasi SPMI melalui pendampingan yang telah dilakukan di SMP Negeri 2 Sajira Kabupaten Lebak kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Sekolah dapat melakukan pemetaan mutu melalui kegiatan evaluasi diri sekolah. Hasil analisis peta mutu menunjukkan standar peningkatan kompetensi PTK dan standar hasil belajar masih rendah yakni masing-masing baru mencapai 2,39 dan 2,92. Standar inilah yang akan ditingkatkan. Sedangkan untuk standar isi pendidikan, standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan pendidikan skor yang dicapai oleh sekolah sudah menuju pada Standar Nasional pendidikan yaitu berturut-turut 3,65; 3,46; 3,84 dan 3,67.
2. Sekolah dapat membuat perencanaan peningkatan mutu yakni merencanakan kegiatan untuk meningkatkan standar peningkatan PTK

dengan kegiatan workshop revitalisasi MGMP dan IHT IT untuk pembelajaran. Sedangkan untuk meningkatkan standar hasil belajar, sekolah membuat kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) KBM.

3. Sekolah dapat melaksanakan program penjaminan mutu sesuai Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disusun yakni menyelenggarakan workshop revitalisasi MGMP Sekolah, IHT IT untuk pembelajaran dan kegiatan penyusunan SOP KBM. Namun dari ketiga kegiatan tersebut belum semuanya tuntas dilaksanakan. workshop revitalisasi MGMP Sekolah baru pada tahap pertemuan awal, demikian pula untuk kegiatan penyusunan SOP KBM baru sampai pada tahap sosialisasi SOP dan SOP itu sendiri belum diimplementasikan. Namun untuk kegiatan IHT IT untuk pembelajaran telah tuntas dilaksanakan dengan ketercapaian 25% guru yang menjadi peserta meningkat kemampuannya.
4. Sekolah dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan melakukan audit internal tentang ketercapaian peningkatan mutu berdasarkan instrument yang telah disusun oleh tim PMP Sekolah bidang audit. Berdasarkan hasil audit dinyatakan bahwa ketercapaian sasaran peningkatan kompetensi PTK baru mencapai 25%, karena belum semua program terlaksana. Sedangkan untuk standar hasil belajar, baru 10% tercapai dari 50% yang ditetapkan. Terbatasnya waktu pendampingan dan kesibukan sekolah menjadi alasan ketidak tercapaian. Namun sekolah bermaksud akan melanjutkan hingga target sasaran tercapai.
5. Sekolah tidak menetapkan standar baru, namun sekolah menetapkan strategi baru yakni menambah personil tim audit yang mempersiapkan instrument sekaligus melaksanakan audit mutu terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu.

SARAN

1. Bagi Pihak Sekolah, implementasi SPMI perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu sekolah, meskipun tanpa program pendampingan dari LPMP
2. Bagi Pihak LPMP, implementasi SPMI melalui program pendampingan hendaknya dilaksanakan dalam durasi waktu yang cukup lama sehingga lebih dapat melihat ketercapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____ Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- _____ Permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- _____ Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

_____ Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan. 2016. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Jakarta

_____ Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Jakarta

Wartoni. Panduan Bimtek Sekolah Model Tahun 2016. 2016. LPMP Banten, Rangkasbitung.